



BAB III

GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalwan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan, yang berkedudukan sebagai unsur Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala Satuan Kerja.

Sekretariat Daerah memiliki kewenangan tugas tentang melaksanakan tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat Daerah, memimpin penyelenggaraan administrasi umum, mengembangkan organisasi dan tatalaksana, membina aparatur dan pelayanan administratif Perangkat daerah, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program di bidang ekonomi pembangunan, kesejahteraan sosial, kerja sama dan investasi, keuangan dan kekayaan Daerah.

III.1. Kondisi Umum Sekretariat Daerah Masa Kini

Kondisi Internal Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

Lingkungan internal Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :



- Memberikan fasilitasi penyempurnaan peraturan
- Pendorong bagi peningkatan kinerja perangkat daerah
- Memiliki komitmen pimpinan
- Memiliki komunikasi yang baik
- Sarana dan prasarana memadai
- Struktur organisasi belum sesuai kebutuhan
- Kualitas sumber daya manusia belum memadai
- Iklim kerja belum sempurna

Kondisi Eksternal Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

Lingkungan eksternal Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

- Adanya dukungan dan tuntutan regulasi
- Kebutuhan pelayanan prima
- Dukungan stakeholder
- Meningkatnya tuntutan dan permasalahan
- Belum utuhnya kepercayaan masyarakat



- Sering berubahnya peraturan perundang-undangan

III.2. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan

Dalam kurun waktu empat tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Sekretariat Daerah diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas manajemen birokrasi melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM aparatur, memantapkan kelembagaan di tingkat unit kerja, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan empat tahun ke depan tidak lagi sering terjadi perubahan peraturan/pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Perlu disikapi secara arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan yang akan diterbitkan.
3. Meningkatnya koordinasi antara institusi pemerintahan dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang penyelenggaraan pemerintahandan keuangan negara.



4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme pemerintahan dan kredibilitas institusi dalam pengelolaan pemerintahan.
5. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
6. Mantapnya koordinasi pengelolaan pemerintahan antar SKPD, SKPD dengan Desa guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang kredibel, terintegrasi dan sinergis.
7. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
8. Tersusunnya *standard operating procedure (SOP)* pemerintahan.
9. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan.
10. Meningkatnya kualitas SDM terhadap penguasaan keahlian (*skill*) yang sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.
11. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.
12. Meningkatnya disiplin dan tanggung jawab PNS yang semakin baik dengan kinerja yang terukur serta berprestasi.